

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK  
PEMBANGUNAN BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)  
SORONG PAPUA  
(Putusan Perkara No: 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)**

**TESIS**

Oleh  
**R. Sri Wahyu Irianti**  
**201520251008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Tindak Pidana Korupsi Proyek  
Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu  
Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua (Putusan Perkara  
Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : R. Sri Wahyu Irianti  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251008  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, April 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH  
NIDN : 0311026802



Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH  
NIDN : 0319046403

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Analisis Tindak Pidana Korupsi Proyek  
Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu  
Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua (Putusan Perkara  
Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : R. Sri Wahyu Irianti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251008

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 08 Mei 2018

M e g e s a h k a n

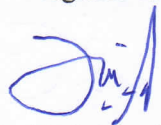
Ketua Tim Penguji : Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH  
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M Hanafi Darwis, SH. MM  
NIDN : 0325117405

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH  
NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

Ketua Program studi  
Magister Ilmu Hukum

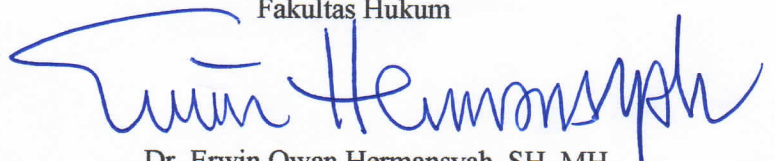


Dr. Dwi Atmoko, SH, MH

NIDN : 0316071604

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIDN : 0319046403

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul :

**Analisis Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Papua**

**(Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, ..... Mei ..... 2018

Yang Membuat Pernyataan,



*Sri Wahyu Irianti*  
Sri Wahyu Irianti  
NPM. 201520251008



# ABSTRAK

**R. Sri Wahyu Irianti. 201520251008.** Analisis Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Bp2IP) Sorong Papua (Putusan Perkara No: 40/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Jkt.Pst).

Tujuan penulis meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Perkara No. 40/PIDSUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst) dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Bp2IP) Sorong Papua dan bagaimanakah Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah untuk mendeskripsikan serta mengetahui sejauhmana pelaksanaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Perkara No. 40/PIDSUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst) serta untuk mengetahui mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam pelelangan atau pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Metode yang penulis gunakan dalam Tesis ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur, komposisi dan kekuatan yang mengikat dalam suatu Undang-Undang dan pendekatannya berpijak pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 55 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

# ABSTRACT

**R. Sri Wahyu Irianti. 201520251008.** Analysis of Corruption Crime Development Project of Education and Training Center of Sailing Science (Bp2IP) Sorong Papua (Case Case No: 40 / Pid.Sus / Tpk / 2016 / Pn.Jkt.Pst). The purpose of the authors examine how the implementation of abuse of authority committed by the defendant in the decision Case No. 40 / PIDSUS / TPK / 2016 / PN.Jkt.Pst) in the Crime of Corruption Sector Development Education and Training Center (Bp2IP) Sorong Papua and how the appropriate Government Procurement Goods and Services mechanism based on Presidential Regulation No. 54/2010 on Procurement of Government Goods and Services is to describe and know the extent of the implementation of abuse of authority committed by the defendant in the decision of Case No. 40 / PIDSUS / TPK / 2016 / PN.Jkt.Pst) as well as to know the mechanism that should be conducted in the auction or procurement of Government Goods or Services as regulated in Presidential Regulation No. 54/2010 concerning Procurement of Government Goods or Services. The method that the writer uses in this Thesis is Normative Juridical Research with descriptive characteristic sourced from secondary data covering primary law material, secondary law material and tertiary law material. This normative juridical research study is a type of legal research that examines the written law of the theoretical aspects, history, comparisons, structures, compositions and binding forces in a law and its approach is based on the Verdict of the Corruption Court at the Central Jakarta District Court Number: 40 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Jkt.Pst, Law Number 31 Year 1999 as amended into Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption, then Law Number 17 Year 2003 on State Finance and also Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services and Regulation of the Minister of Transportation Number: PM 55 Year 2013 About Guidelines And Standards Procurement Document Construction Works In Ministry of Transport Environment.

**Keywords :** Law, Corruption Crime, Misuse of Authority and Corruption Eradication Commission.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa, atas berkat limpahan rahmat dan bimbingannya maka penulis dapat menyusun proposal tesis ini dengan judul **ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) DI SORONG PAPUA** dengan baik dan lancar. Penulisan tesis merupakan tugas guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata II (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing penulisan Proposal dan Tesis, serta Ketua Tim Penguji dalam Tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing dan Penguji dalam penulisan Proposal Tesis ini.
4. Bapak Profesor Koesparmono Irsan, SIK, SH, MBA, MM, selaku Dosen Penguji Tesis.
5. Bapak Dr. Hotma Sibuea, SH, MH, selaku Dosen Penguji Tesis dalam memberikan masukan dalam sidang Tesis.
6. Bapak Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, SH, MM, selaku Dosen Penguji Proposal dan Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya yang telah memberikan bekal akademik bagi penulis semasa perkuliahan.

8. Ibu, Suami dan anak-anak, sahabat-sahabat, staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membecanya.

Jakarta, Mei 2018



Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Peneliatian .....	12
1.4 Kerangka Teori .....	13
1.4.1 Kerangka Konsepsional .....	17
1.4.2. Kerangka Pemikiran.....	20
1.5 Metode Penelitian.....	22
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.5.2 Analisis Data.....	22
1.6 Sistematika Penulisan.....	22
B A B II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
2.1 Definisi Korupsi.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	28

2.3	Tinjauan Umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	32
2.4	Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	35
2.5	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 .....	43
2.6	Tinjauan Umum Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999.....	45
2.7	Tinjauan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .....	55
	2.7.1 Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan.....	55
	2.7.2 Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan	62
2.8	Tinjauan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.....	65
2.9	Tinjauan Umum Keuangan Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 200.....	72
3.0	Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.....	79
<b>BAB III PENYALAHGUNAAN WEWENANG.....</b>		<b>87</b>
3.1	Sejarah Hukum Administrasi Negara.....	87
3.2	Pembahasan Mengenai Penyalahgunaan Kewenangan.....	92
3.3	Analisis Penyalahgunaan Wewenang oleh Bobby Reynold Mamahit...	97
	3.3.1 Perbuatan Bobby Reynold Mamahit Penuhi Unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi.....	102
	3.3.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara.....	113
<b>BAB IV PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH .....</b>		<b>117</b>
4.1	Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	123

4.2	Modus Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	121
4.3	Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bobby Reynold Mamahit.....	137
BAB V PENUTUP .....		148
5.1	Simpulan.....	148
5.2	Saran.....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>153</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>160</b>

